

Memahami Objektivitas Dalam Penilaian Moral

Oleh : Fakhruddin

fakhruddin@uinjkt.ac.id

Abstract: *Can moral judgment be objective" Unlike scientific judgment, moral judgment is often considered simply subjective. This article is an attempt to argue against this contention. The article is divided into three parts, First, as a background for the problem, it will be shown how the scientific view of reality and its limited view of objectivity has given rise to the problem of objectivity in moral judgment. Second, to see the similarities and differences between the concept of objectivity in scientific judgment and in moral judgment, the two will be compared. Third, to bolster the argument for supporting the idea of objectivity in moral judgment, some criteria for the objectivity of moral judgment will be provided.*

Kata Kunci : objektivitas, relativisme, subjektif-objektif.

A. Pendahuluan

Masalah objektivitas dalam penilaian moral sebenarnya bukan masalah yang sama sekali baru. Pada zaman Yunani Kuno, yakni dalam polemik antara Sokrates (yang dilanjutkan oleh Plato) dengan para Sofis atau Skpetisis (seperti Protagoras, Tracymachus, Georgias), masalah tersebut sudah muncul. Waktu itu Sokrates dan Plato, yang berkeyakinan bahwa nilai-nilai dan norma moral didasarkan atas kodrat (*physis*), dan karenanya bersifat objektif serta tetap tak berubah, dengan keras menentang pandangan kaum Sofis yang berpendapat bahwa nilai-nilai dan norma moral tidak lebih dari suatu kebiasaan (*nomos*) saja yang akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Walaupun masalah objektivitas dalam penilaian moral bukan masalah yang sama sekali baru, namun berbeda dengan situasi permasalahan pada zaman Yunani Kuno, di mana sains sama sekali belum muncul sebagai ilmu yang dominan dan

terpisah dan filsafat, pada zaman modern (khususnya sejak abad ke-17 sampai dengan awal abad m) masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari besarnya pengaruh sains yang dianggap sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan manusia yang memiliki kebenaran objektif.

Dalam pandangan sientistik tentang realitas, hanya apa yang dapat dibuktikan keberadaannya secara publik berdasarkan cara pembuktian ilmiah dapat disebut real atau nyata. Model untuk memahami realitas diambil dari dunia fisika klasik yang bersifat materialistik dan mekanistik. Dalam konteks itu, fakta dimengerti sebagai sesuatu yang bukan hanya berbeda, tetapi juga samasekali terpisah dari nilai. Hanya fakta dapat bersifat objektif, dan objektif di sini dimengerti sebagai cm dari sesuatu yang dapat dibuktikan adanya secara publik serta lepas samasekali dari keterlibatan subjek pengamat.

Karena dilatar belakangi oleh pandangan sientistik tentang realitas seperti di atas, maka orang seperti John Mackie¹, misalnya, menolak atau paling tidak bersikap skeptis tentang adanya objektivitas dalam hal nilai-nilai. Ia berpendapat bahwa seandainya ada realitas yang disebut nilai-nilai objektif, maka hal tersebut mestilah akan merupakan entitas, kualitas, ataupun relasi yang jenisnya amat aneh, samasekali lain dan realitas biasa yang ada dalam alam semesta. Apalagi, sejajar dengan itu, seandainya hal tersebut mungkin kita ketahui, maka pastilah mengandaikan adanya suatu kemampuan persepsi moral atau intuisi yang samasekali lain dan cara kita yang biasa untuk mengetahui segala sesuatu yang lain. Bagi orang seperti Mackie, pernyataan bahwa seorang majikan yang secara sewenang-wenang menindas para buruhnya itu secara moral objektif salah, tidak dapat ditentukan, karena objektivitas kualitas moral itu tidak ada; apalagi, seandainya ada, toh tidak dapat kita ketahui. Baginya pernyataan benar-salah atau baik-buruk dalam hal moral lebih dapat dijelaskan bukan atas dasar objektivitas kualitas moral yang terkandung dalam suatu tindakan, tetapi atas dasar tanggapan subjektif dari si pembuat pernyataan terhadap tindakan tertentu. Suatu perbuatan dinilai baik atau buruk, bukan karena hakikat perbuatan itu sendiri, tetapi dalam relasi dengan keinginan dan kepentingan subjek yang menilai.

Anggapan Mackie bahwa kalau ditentukan adanya realitas yang disebut nilai-nilai objektif itu kemudian mengandaikan adanya entitas, kualitas, atau relasi yang berjenis amat aneh, muncul sebagai konsekuensi dari pemahamannya tentang objektivitas yang berakar pada pandangan tentang realitas yang bersifat sientistik.² Itulah pandangan tentang objektivitas yang jatuh ke paham objektivisme. Dalam paham objektivisme memang tidak ada tempat bagi kemungkinan adanya objektivitas dalam penilaian moral, karena penilaian moral selalu tidak pernah dapat bersifat impersonal atau tanpa keterlibatan sama sekali dan pihak subjek. Akan tetapi pemikiran dalam sains pun demikian pula. Apalagi, seperti pernah dengan baik dijelaskan oleh Max Deutscher³, tidak setiap keterlibatan emosional dari subjek merupakan distorsi terhadap objektivitas pengetahuan.

Dalam hal penentuan benar-salahnya suatu tindakan secara moral atau penilaian tentang baik-buruknya suatu perbuatan, keterlibatan emosional dari pihak subjek yang menilai memang lebih besar, karena terhadapnya, berbeda dengan terhadap benda-benda fisik yang diselidiki dalam penelitian sains, subjek lebih tidak bisa bersikap netral. Namun ini tidak berarti bahwa objektivitas dalam penilaian moral menjadi tidak mungkin. Mackie benar bahwa kebaikan dan keburukan sesuatu atau benar-salahnya suatu penilaian moral tidak dapat ditentukan sama sekali lepas dari hasrat keinginan dan kepentingan subjek. Tetapi ia keliru kalau kemudian menank kesimpulan bahwa baik buruknya sesuatu atau benar-salahnya suatu pernyataan moral itu tergantung atau melulu ditentukan oleh hasrat keinginan dan kepentingan subjek. Sesuatu yang baik itu memang pantas diinginkan dan memenuhi kepentingan orang, tetapi tidak semua hal yang kebetulan diinginkan dan memenuhi kepentingan seseorang itu dengan sendirinya menjadi baik dan pantas diinginkan.⁴ Dari kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia ada nilai-nilai yang umumnya dipandang pantas dan bahkan seharusnya diinginkan, jelas bahwa ada nilai-nilai yang bersifat objektif. Demikian pula, walaupun penentuan baik-buruk tidak dapat bersifat impersonal (semacam "*a view from nowhere*" model Thomas Nagel), namun dan kenyataan bahwa orang

dalam hubungan intersubjektifnya dapat berdiskusi tentang penentuan tersebut serta dapat menguji kebenarannya dalam praksis kehidupan bersama, kiranya dapat disimpulkan bahwa objektivitas dalam penentuan baik-buruk itu memang ada.

Dalam pandangan tentang realitas yang bersifat sientistik, meminjam peristilahan van Peursen,⁵ realitas biasanya dimengerti sebagai suatu "substansi", suatu benda kongkret dalam dunia, suatu "objek yang bisa dipungut begitu saja". Pemahaman tentang realitas seperti itu memang akan mengakibatkan dualisme antara realisme dan idealisme, dualisme antara fakta dan nilai, serta dualisme antara ilmu pengetahuan (sains) dan etika. Akan tetapi realitas tidak perlu dipahami seperti itu. Mengikuti pendapat van Peursen, realitas sebaiknya dipahami sebagai suatu proses dan peristiwa yang diungkap dan diungkapkan dalam bahasa manusia dengan berbagai sistem simbolnya. Sebagai rangkaian peristiwa, realitas merupakan suatu kisah panjang sejarah dan kebudayaan umat manusia yang penuh dengan nilai. Realitas lebih merupakan suatu aturan, suatu penunjuk arah bagi kegiatan kita dalam konteks hubungan intersubjektif daripada suatu benda fisik yang begitu saja dapat diambil dari tanah. Realitas berfungsi menunjukkan bagaimana kita harus melihat sesuatu, bagaimana kita harus bertindak. Realitas perlu dipahami dalam perspektif penilaian dan perilaku normatif. Dimengerti sebagai suatu proses dan peristiwa, "realitas adalah lebih dari sekedar alam semesta yang material, lebih dari rangkaian fakta. Realitas adalah "ethos", suatu himbauan, suatu tuntutan yang membuat manusia sadar akan tanggungjawabnya".⁶ Dalam pemahaman tentang realitas seperti ini, objektivitas kebenaran pengetahuan lebih dimengerti sebagai reliabilitas (bersifat dapat diandalkan bila diterapkan) daripada sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan adanya secara publik melalui berdasarkan pengamatan empiris maupun konsistensi penalaran, sebagaimana biasa dianggap sebagai ciri objektivitas dalam sains.

B. Objektivitas Dalam Sains dan Objektivitas Dalam Moral.

Karena pandangan tentang realitas yang bersifat sientistik yang melatar belakangi munculnya masalah objektivitas dalam penilaian moral pada zaman modern berpengaruh amat luas, ada baiknya diperoleh kejelasan tentang kesamaan dan perbedaan pengertian objektivitas dalam sains dan objektivitas dalam moral, serta hubungan antara keduanya. Secara sederhana kesamaan pengertian objektivitas dalam sains dan objektivitas dalam moral terletak dalam kenyataan bahwa keduanya berkenaan dengan soal kebenaran pengetahuan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa objektivitas dalam sains menyangkut kebenaran pengetahuan teoretis, dan objektivitas dalam hal moral menyangkut kebenaran pengetahuan praktis.

Dalam dua dasawarsa belakangan ini, dengan semakin dikenalnya dan diakui adanya dimensi hermeneutis dalam sains, pemisahan tegas antara fakta dan nilai, antara sains kealaman dan sains kemanusiaan, pemisahan yang membuahkan paham objektivisme rasionalistik dalam pengetahuan dan subjektivisme emotivistik dalam penilaian, sudah semakin ditinggalkan.⁷ Kritik terhadap pandangan positivistik sudah banyak dilancarkan oleh para filsuf sains seperti Thomas Kuhn, Feyerabend, Hilary Putnam, Mary Hesse, dsb. Mary Hesse misalnya menunjukkan ciri-ciri yang sebelumnya dipakai sebagai pembeda tegas antara sains kealaman dan sains kemanusiaan, akhir-akhir ini pada masa yang dia sebut *postempiricism*, berkat hasil studi sejarah sains, disadari bahwa apa yang sebelumnya hanya dipakai untuk mencirikan hakikat dan cara kerja sains kemanusiaan, ternyata berlaku juga untuk sains kealaman. Misalnya, dalam kenyataan, bukan hanya dalam sains kemanusiaan saja bahwasanya apa yang disebut data itu tidak dapat dipisahkan dan teon, tetapi juga dalam sains kealaman. Selain itu, dalam sains kealaman, teori bukanlah model yang secara eksternal dapat dibandingkan dengan alam dalam skema yang bersifat hipotetis-deduktif, melainkan merupakan cara bagaimana fakta sendiri dilihat.⁸

Menurut Hilary Putnam, pemisahan tegas antara fakta dan nilai muncul dari anggapan yang keliru bahwa 'kebenaran' dan pengetahuan' merupakan milik khusus sains, dan sains lah yang dapat menegaskan mana yang fakta dan mana yang bukan. Segala sesuatu yang bukan sains bukanlah pengetahuan dan tidak dapat ditegaskan benar-salahnya. Anggapan ini keliru, karena ruang lingkup pengetahuan itu lebih luas daripada sains. Putnam membenarkan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa etika, yang pada pokoknya berkenaan dengan kajian tentang bagaimana hidup baik dan bagaimana mencapai kebahagiaan bagi manusia, adalah juga pengetahuan. Memang, pengetahuan yang dibenkan oleh etika itu berbeda dengan pengetahuan yang dibenkan oleh sains. Etika memberi pengetahuan praktis, sedangkan sains membenarkan pengetahuan teoretis. Ruang lingkup pengetahuan tidak identik dengan sains. Bagi Putnam pandangan tentang pengetahuan yang mengakui bahwa ruang lingkup pengetahuan itu lebih luas daripada ruang lingkup sains, merupakan suatu keharusan kultural kalau kita mau sampai pada pandangan yang sehat dan manusiawi tentang diri kita dan tentang sains sendiri.⁹ Putnam juga menyatakan. "fakta bahwa hidup baik tidak dapat direduksikan ke sebuah sains tidak berarti bahwa refleksi tentang bagaimana hidup baik bukan suatu usaha rasional, atau bahwa tidak mungkin ada pengetahuan objektif tentangnya."¹⁰

Objektivitas dalam sains sebagai pengetahuan teoritis memang mempunyai derajat kepastian yang lebih tinggi daripada objektivitas dalam etika sebagai pengetahuan praktis. Dua puluh empat abad yang lalu Aristoteles sudah menyatakan: "Adalah sama-sama bodoh untuk menentang argumen-argumen yang hanya bersifat barangkali (*probable*) dan seorang matematikawan dan untuk menuntut suatu pembuktian ketat (*strict demonstration*) dari seorang orator".¹¹ Masing-masing pengetahuan memiliki derajat kepastiannya sendiri sesuai dengan hakikat objek yang dikajinya.

Kalau ditempatkan dalam konteks praksis kehidupan di mana minat dan kepentingan akan adanya objektivitas *pengetahuan* sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan *arti dan nilai* objektivitas sendiri bagi *perkembangan dan kepenuhan*

hidup manusia sebagai manusia, maka rnmnat dan kepentingan akan adanya objektivitas dalam sains sebenarnya mengandaikan objektivitas dalam hal moral. Artinya, penentuan tentang arti dan mlai objektivitas sendiri bagi perkembangan dan kepenuhan hidup manusia sebagai manusia tidak dapat dilakukan sewenang-wenang secara subjektif atau tanpa adanya *constraint* objektif. Seperti pernah dikemukakan oleh Alasdair MacIntyre, komunitas para ilmuwan adalah salah satu dari komunitas-komunitas moral umat manusia dan kesatuan komunitas tersebut tidak dapat dimengerti lepas dari komitmen para anggotanya terhadap cita-cita hidup yang bersifat regulatif (*regulatif ideals*) bagi pelaksanaan kegiatan ilmiah mereka. *"To be objective, then, is to understand oneself as part of a community and one's work as part of a project and part of a history. The authority of this history and this project derives from the goods internal to the practice. Objectivity is a moral concept before it is a methodological concept, and the activities of natural science turn out to be a species of moral activity."*¹²

C. Tolok Ukur Bagi Objektivitas Dalam Penilaian Moral.

Objektivitas pada dasarnya adalah perkara pertanggungjawaban rasional ke arah kebenaran atau perkara pengujian kebenaran oleh akalbudi manusia. Oleh karena itu, tolok ukur umum dan utama bagi adanya objektivitas dalam penilaian moral, sebagaimana juga dalam pemikiran apa pun, adalah apakah pemikiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dmji kebenarannya secara rasional. Artinya, apakah argumen-argumen yang mendasan pemikiran tersebut dapat tahan uji di hadapan "pengadilan" akalbudi. Kalau suatu argumen dapat dipertahankan kebenarannya di hadapan "pengadilan" akalbudi, maka argumen tersebut secara objektif memang benar.

Sejajar dengan adanya tiga tolok ukur kebenaran, tolok ukur umum tersebut dapat dinnci lebih lanjut dalam tiga tolok ukur khusus berikut. Tolok ukur khusus yang pertama adalah kesesuaian atau adanya korespondensi antara isi pernyataan dengan realitas objektif di luar subjek. Seperti dinyatakan dalam

teori kebenaran yang disebut teori korespondensi, suatu pernyataan itu objektif benar kalau ada korespondensi antara apa yang dinyatakan dalam pikiran dan bahasa (sebagaimana terungkap dalam isi pernyataan tersebut) dengan realitas sendiri. Karena keberadaan dan makna realitas sendiri sebagai objek kajian tidak dapat dimengerti lepas dan aktivitas manusia sebagai subjek yang aktif bertanya dan mencan, maka tolok ukur khusus yang kedua adalah adanya koherensi atau konsistensi antara pernyataan yang dimaksud dengan (sistem) pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Selain itu, karena sesuai tidaknya pernyataan yang dimaksud dengan realitas sendiri, antara lain dapat diketahui dan berhasil tidaknya atau terbukti benar tidaknya dalam praktek hidup bila pernyataan itu diwujudkan dalam tindakan, maka tolok ukur khusus yang ketiga adalah bagaimana akibatnya bagi praktek kehidupan bersama manusia sebagai manusia. Kalau akibat tindakan yang dilakukan sesuai dengan pernyataan tersebut ternyata semakin menunjang perkembangan dan kepenuhan hidup manusia, maka pernyataan tersebut secara objektif benar. Sebaliknya, bila semakin merusak dan merugikan, maka pernyataan tersebut salah.

Kalau diterapkan dalam hal moral, tolok ukur khusus pertama nampak misalnya dalam teori etika normatif hukum kodrat. Menurut teori ini, suatu pernyataan moral itu benar secara objektif kalau isi pernyataan tersebut berkorespondensi atau sesuai dengan kodrat manusia yang pada dasarnya sama untuk semua orang. Kodrat manusia yang keberadaannya tidak tergantung dari manusia, karena merupakan buah ciptaan Tuhan, tidak hanya bersifat indikatif (memuat fakta yang dapat dideskripsikan) tetapi juga imperatif (memuat perintah untuk bertindak menurut fakta tersebut). Karenanya kodrat manusia menjadi hukum yang digantikan oleh Sang Pencipta sendiri dan wajib dipatuhi kalau manusia mau mencapai tujuan akhir hidupnya sebagai manusia, yakni kebahagiaan abadi (dalam penstilan Thomas Aquinas: *visio beatifica*). Dalam pemahaman ini, tolok ukur yang dipakai untuk menentukan objektif tidaknya pernyataan moral adalah sesuai tidaknya dengan tuntutan kodrat manusia.

Contoh penerapan tolok ukur khusus kedua dalam pengujian kebenaran pernyataan moral adalah prinsip universalisasi kaidah tindakan sebagaimana dikemukakan dalam teon etika deontologis Immanuel Kant. Bagi Kant, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral (dan implikasinya kaidah atau prinsip moral yang mendasan tindakan tersebut objektif benar) kalau kaidah atau prinsip moral yang mendasan tindakan tersebut dapat sekaligus dikehendaki oleh si pelaku tindakan sebagai kaidah yang tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi juga berlaku umum bagi semua makhluk rasional. Benar-salahnya tindakan dan dengan demikian juga benar-salahnya suatu pernyataan moral di sini tidak lagi dikaitkan dengan konsep kesesuaian dengan tuntutan kodrat ataupun dengan kondisi faktual empiris yang melingkupi tindakan sebagaimana halnya dalam teon hukum kodrat, tetapi ditentukan berdasarkan sesuai tidaknya secara formal dengan tuntutan hukum moral yang bersifat a priori dan mutlak. Prinsip universalisasi kaidah tindakan melulu didasarkan atas konsistensi logis dan tuntutan akalbudi praktis. Konsep moralitas pada Kant secara hakiki bersifat deontologis (= menekankan prinsip kewajiban) dan non-naturalistik.

Untuk contoh penerapan tolok ukur khusus ketiga dapat disebut misalnya teon etika naturalistik dari John Dewey dan etika utilitans dari John Stuart Mill. Baik dalam teori etika naturalistik John Dewey maupun dalam teori etika utilitans John Stuart Mill, benar-salahnya suatu tindakan secara moral, tidak dilihat dari sesuai tidaknya dengan tuntutan kodrat manusia yang sudah baku (karena ditetapkan oleh Sang Pencipta) ataupun dan sesuai tidaknya dengan hukum moral yang berlaku secara mutlak dan a priori, tetapi dari akibat empiris faktual tindakan tersebut dalam kehidupan bersama suatu masyarakat manusia. Objektivitas nilai-nilai dan prinsip moral di sini juga memuat unsur universalitas atau keberlakuan umum nilai-nilai dan prinsip tersebut, tetapi tidak dalam arti Kant di atas. Karena keberlakuan umum di sini tidak ditentukan secara a priori dan ahistoris melulu berdasarkan konsistensi rasional, tetapi secara empiris faktual. Apa yang wajib secara moral adalah apa yang

dalam kenyataan sesuai dengan realitas alam dan masyarakat manusia sejauh dikenali oleh manusia, khususnya dengan menerapkan metode kerja sains. Devvey mencita-citakan suatu penerapan metode kerja sains juga dalam etika. Walaupun sama-sama menentukan moralitas tindakan berdasarkan akibat tindakan tersebut, namun etika utilitaris John Stuart Mill tidak persis sama dengan etika naturalistik dan pragmatik John Dewey. Dalam menentukan objektif tidaknya suatu nilai atau pun prinsip moral, perhatian etika utilitaris tidak pertama-tama diarahkan pada akibat pragmatismenya bagi kehidupan manusia, tetapi lebih pada maksimalisasi akibat baik dibandingkan akibat buruknya.

Memperhatikan ketiga tolok ukur khusus di atas, menjadi nyata bahwa masing-masing mempunyai sumbangannya sendiri bagi pendasaran objektivitas. Akan tetapi kalau hanya salah satu dari ketiga tolok ukur tersebut dipakai dan yang lain diabaikan, maka rupanya menjadi kurang memadai. Khususnya dalam hal moral, misalnya kalau pendasaran objektivitas penilaian moral melulu ditentukan oleh sesuai tidaknya dengan tuntutan kodrat manusia, maka akan timbul beberapa kesulitan. Pertama, mengenai konsep kodrat manusia sendiri sulit dicap kesepakatan pendapat, sehingga penentuan tentang mana yang sesuai dengan tuntutan kodrat dan mana yang tidak, menjadi hal yang masih tidak jelas bagaimana mau dilakukan. Kedua, penilaian moral tidak hanya menyangkut apa yang secara faktual deskriptif atau senyatanya dilakukan karena dipandang baik atau benar secara moral oleh suatu kelompok masyarakat, tetapi lebih-lebih berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai manusia di mana saja dan kapan saja ia berada. Kalau pendasaran objektivitas prinsip moral hanya digantungkan pada kesesuaiannya dengan kondisi faktual kodrat kemanusiaan bagaimana sifat normatif dan kemutlakan prinsip moral dapat dijelaskan? Kesulitan kedua ini erat berkaitan dengan apa yang oleh G.E. Moore disebut "*the naturalistic fallacy*", yakni kekeliruan logis untuk menarik kesimpulan yang bersifat normatif (*the 'ought' statement*) dari premis-premis yang bersifat deskriptif (*the 'is' statement*). Dengan kata lain, dari kenyataan bahwa kodrat manusia begini dan begitu tidak dapat

disimpulkan bahwa manusia seharusnya atau wajib bertindak begini dan begitu.

Terhadap kesulitan pertama, teori etika naturalistik dan pragmatik John Dewey dan teori etika utilitans John Stuart Mill dapat membantu menemukan jalan keluar, sekurang-kurangnya dengan menunjukkan salah satu cara untuk mengenali mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Memang kalau hanya memakai tolok ukur khusus ketiga, yang beraru menyamakan begitu saja antara apa yang berhasil dalam praktek kehidupan bersama umat manusia atau apa yang mendatangkan keuntungan yang semakin besar bagi semakin banyak orang dalam masyarakat dengan apa yang secara objektif sesuai dengan kodrat manusia, memuat bahaya tersendiri bagi moralitas. Tidak semua pernyataan moral yang bila dilaksanakan dalam tindakan lalu akibatnya mendatangkan keberhasilan atau keuntungan yang semakin besar bagi semakin banyak orang itu dengan sendinnya benar. Sebaliknya tidak semua pernyataan moral yang kebetulan gagal dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kepentingan banyak orang itu dengan sendinnya salah. Akan tetapi, asal bahaya tersebut tetap disadari dan orang berusaha untuk tidak jatuh ke dalamnya, secara metodis apa yang dikemukakan oleh teori etika naturalistik dan pragmatik John Dewey maupun teori etika utilitaris John Stuart Mill dapat membantu menemukan jalan keluar bagi kesulitan pertama.

Tolok ukur khusus kedua sebagaimana nyata dalam etika deontologis Kant, dapat memben petunjuk bagaimana menghindari kesulitan yang kedua. Universalitas dan keniscayaan dalam hal moral tidak dapat didasarkan atas kenyataan alam atau kodrat empiris manusia sebagaimana objektivitas dan keniscayaan dalam hal pengetahuan (sains). Sebab, dalam kenyataan alam berlaku kausalitas yang bersifat deterministik, sedangkan moralitas mengandaikan kebebasan. Universalitas (yang dapat menjadi tolok ukur objektivitas dalam hal moral) dan keniscayaan atau kemutlakan dari keberlakuan hukum moral pada etika Kant didasarkan atas struktur a priori akalbudi praktis atau penghendakan manusia. Hukum moral

bagi Kant adalah imperatif yang bersifat kategons, artinya suatu kewajiban (dalam bentuk perintah atau larangan) yang tidak dapat ditawar-tawar. Akan tetapi hukum moral tidak merupakan sesuatu yang memaksa dari luar, karena justru dengan melaksanakan kewajiban moralnya (yang memuat sesuatu yang disadari sebagai bernilai pada dirinya sendiri), manusia sebagai makhluk rasional menghayati kebebasannya. Hukum moral pada dasarnya adalah hukum yang secara bebas ditetapkan oleh manusia sendiri bagi dirinya sebagai makhluk rasional.

Walaupun pendasaran objektivitas dan keniscayaan moralitas secara non-naturalistik, karena melalui didasarkan atas struktur a priori akalbudi praktis manusia, dapat menghindarkan diri dari kelemahan yang disebut *the naturalistic fallacy*, namun pendasaran seperti itu saja rupanya juga tidak memadai. Kalau moralitas melalui diletakkan dalam hngkup noumenal yang sendiri tidak dapat kita ketahui dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hngkup fenomenal atau dunia empiris sehari-hari dan apa yang disebut kodrat kemanusiaan dengan seluruh konteks sosial-histonsnya yang dapat kita ketahui, maka pnnsip moralitas menjadi melalui formal. Kalau prinsip moralitas melalui formal, maka pelaku moral tidak mendapat pegangan untuk secara positif menentukan mana yang secara kongkret wajib ia lakukan. Padahal setiap tindakan itu selalu kongkret. Imperatif kategons Kant sebagai pnnsip moral yang melalui ' formal paling-paling hanya dapat menetapkan batas negatif tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan. Prinsip universalisasi yang menekankan konsistensi penalaran atau bertentangan tidaknya dengan akalbudi sebagai satu-satunya tolok ukur a priori yang tersedia untuk menguji apakah kaidah atau prinsip yang mendasari tindakan dapat dikehendaki sebagai kaidah yang berlaku umum seperti pernah dinyatakan oleh Hegel juga belum dapat menyelamatkan imperatif kategoris Kant dari sifat abstraknya.

Demikianlah sebagai tolok ukur bagi objektivitas dalam penilaian moral pertama-tama perlu dilihat apakah pemikiran tersebut sesuai dengan tuntutan kodrat manusia yang menggariskan arah dan tujuan akhir hidup manusia sebagai manusia. Kedua, apakah akibat tindakan yang mewujudkan

pemikiran tersebut memperkembangkan manusia ke arah kepenuhan hidupnya sebagai manusia. Akhirnya, apakah pemikiran tersebut didasan oleh motivasi yang murni, dan itu dapat dinilai dan sesuai tidaknya dengan tuntutan hukum moral yang berlaku mutlak dan universal bagi semua manusia sebagai makhluk rasional yang wajib mengusahakan terwujudnya apa yang bernilai pada dirinya sendiri.

¹John I. Mackie, *Ethics: Inventing Right and Wrong*, Harmondsworth: Penguin, 1977:h. 38

²John Finnis, *Fundamentals of Ethics*, Washington, D.C: Georgetown University Press, 1983:h.57-66

³Dalam bukunya berjudul *Subjecting and Objecting: An Essav in Objectivity*, Oxford: Basil Blaekuell, 1983:h.13-27; 137-168.

⁴Dalam kaitan dengan ini, John Dewey misalnya pernah menekankan perlunya membedakan antara apa yang senyatanya diinginkan (*what is desired*) dan apa yang pantas atau seharusnya diinginkan (*what is desirable*) Yang kedua memuat unsur objektivitas, karena, berbeda dengan yang pertama, yang kedua bukan sekedar ungkapan keingman spontan seseorang, tetapi sudah mengandaikan pertunbangan masak-masak akalbudi berdasarkan pengalaman akan akibat-akibatnya dalam praksis kehidupan manusia sebagai manusia. Lih. John Dewey. *Theory of Valuation*, Chicago: University of Chicago Press, 1972: h. 31-33.

⁵C A. van Peursen, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf, Jakarta: PT Gramedia, 1990, khususnya Bab II, III, VII dan VIII.

⁶Van Peursen, *Fakta*, h. 89

⁷Richard J. Bernstein, *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Henneneutics, and Praxis*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985, khususnya Part One.1

⁸Mary Hesse, "In Defence of Objectivity," *datem. Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*, Brighton, England: Harvester Press, 1980:h.167-186.

⁹Hilary Putnam, *Meaning and The Moral Sciences*, Boston, London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1978:h.5.

¹⁰Hilary Putman, *eleaning*, h.5.

¹¹Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Book I, 3. Transl. by Martin Ostwald, Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publishing, 1962:h. 5.

¹²Alasdair MacIntyre, "Objectivity in Morality and Objectivity in Science," dalam 11 Tristain Englehardt. Jr. and Daniel Callahan (Eds.),

Moral, Science and Society, New York: The Hastings Center Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, 1978:h. 37. Gagasan senada juga dikemukakan oleh Karl-Otto Apel dalam kritiknya terhadap konsep rasionalitas ilmiah-teknologis Max Weber. Menurut Apel, rasionalitas ilmiah-teknologis yang bebas nilai sendiri sebenarnya mengandaikan rasionalitas yang lebih dasarnya, yakni rasionalitas hermeneutis dan etis. Lihat Karl-Otto Apel, "The Common Presuppositions of Hermeneutics and Ethics: Types of Rationality Beyond Science and Technology," dalam John Sallis, *Studies in Phenomenology and the Human Sciences*, Atlantic Highlands. N.J. Humanities Press, 1979.h. 35-52.

REFERENSI

- Apel, Karl-Otto "The Common Presuppositions of Hermeneutics and Ethics. Types of Rationality beyond Science and Technology," dalam John Sallis (Ed.), *Studies in Phenomenology and The Human Sciences* Atlantic Highland, N.J.: Humanities Press, 1979: pp. 35-53.
- Bernstein, Richard J. *Beyond Objectivism and Relativism Science, Hermeneutics, and Praxis* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985.
- Deutscher, Max *Subjecting and Objecting: An Essay in Objectivity* Oxford Basil Blackwell, 1983.
- Dewey, John *Theory of Valuation* Chicago. University of Chicago Press, 1972.
- Ferre, Frederick *Knowing and Value: Toward a Constructive Postmodern Epistemology* Albany: State University of New York Press, 1998.
- Finnis, John *Fundamental Principles of Ethics* Washington, D.C: Georgetown University Press, 1983.

Hesse, Mary "In Defence of Objectivity," dalam *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*, (Brighton, England. Harvester Press, 1 980).

Kolnai, Aurel *Ethics, Value and Reality*, London: The University of London, 1977.

MacIntyre, Alasdair "Objectivity in Morality and Objectivity in Science," dalam H. Tristram Englehardt, Jr. and Daniel Callahan (Eds.), *Morals, Science and Society*, New York: The Hastings Center Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, 1978: pp. 21-39.

Peursen, C. A. van *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Platts, Mark *Ways of Meaning: An Introduction to a Philosophy of Language*, London Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1979.

Putnam, Hilary *Meaning and The Moral Sciences* Boston, London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1978.

----- *Reason, Truth and History* Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Poole, Ross, *Morality and Modernity*, London: Routledge, 1991.

White, Morton *What Is and What Ought to Be Done: An Essay on Ethics and Epistemology*, Oxford: Oxford University Press, 1981.